

VALIDITAS DAN RELIABILITAS PENGUKURAN KELUARGA SEJAHTERA*

Faturochman**
Agus Dwiyanto***

Abstract

This article critically examines the family welfare data collected by the National Family Planning Board (BKKBN). Comparing the BKKBN's data with the UGM's data, the article demonstrates significant differences in family distribution, in most of the family welfare indicators. As a result, the categorization of families into family welfare stages between BKKBN's data and UGM's data differs considerably. This raises some issues on the reliability and validity of BKKBN's family welfare registration data. The article also discloses weaknesses embedded in the instrument and data collection processes which may hurt the reliability and validity of the BKKBN's data. Thus, the improvement of the instrument as well as the process of collecting data is absolutely necessary if the BKKBN is to more effectively implement its family welfare programs.

Pendahuluan

Pada awal tahun 1998 ini dilaksanakan registrasi pendataan keluarga yang pelaksanaannya dikelola oleh Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi tentang pendataan ini antara lain ditayangkan di televisi secara nasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampai batas akhir pelaksanaan masih ada beberapa desa yang *tidak*

tahu tentang itu, baik perangkat desa, kader, maupun anggota masyarakat masih ada yang belum tahu, dan karenanya mereka tidak melaksanakan pendataan keluarga sejahtera (KS). Apabila pendataan itu telah dianggap selesai, muncul pertanyaan: "Apakah kualitasnya memadai?" "Mengapa ada perbedaan fakta di lapangan dan di

* Artikel ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dibiayai oleh Family Health International. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Karen Hardee dan Dr. Elizabeth Eggleston yang banyak membantu pelaksanaan penelitian.

** Drs. Faturochman, M.A. adalah peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.

*** Dr. Agus Dwiyanto adalah kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Isipol, Universitas Gadjah Mada.

laporan?" Artikel ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Pendataan keluarga dinilai sebagai langkah penting karena memiliki banyak fungsi, utamanya untuk memahami kelompok sasaran dan menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah dari setiap kelompok sasaran itu. Hal itu terjadi bila data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Mengingat kualitas data menjadi isu yang penting, tulisan ini mencoba mengkaji secara kritis kualitas data yang dihasilkan oleh pendataan KS. Untuk menilai kualitas data yang dimaksud, tulisan ini juga mengkaji format dan struktur alat ukur, proses pengambilan data, serta hasilnya.

Pengumpulan data, apa pun tujuannya, selalu berupaya untuk mendapatkan fakta yang relevan, akurat, dan reliabel. Hal ini dapat dicapai bila menggunakan teknik, prosedur, alat, dan kegiatan yang andal (Hadi, 1984). Register pendataan keluarga sebagai bagian dari sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam upaya mengidentifikasi keluarga, khususnya tingkat kesejahteraannya. Meskipun demikian, akurasi dan reliabilitas data yang diperoleh dari register tersebut belum teruji. Untuk mengujinya, di sini hanya dilihat tiga hal pokok, yaitu alat ukur, penyelenggaraan pengukurannya, dan hasil pendataan.

Alat Ukur

Register pendataan keluarga terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dimaksudkan untuk memperoleh data

demografis dan keluarga berencana, sedangkan bagian kedua dimaksudkan untuk mendata keluarga sejahtera, pengeluaran keluarga, dan perolehan bantuan modal dari Prokesra. Bagian kedua, khususnya tentang keluarga sejahtera, inilah yang menjadi fokus bahasan di sini.

Keluarga sejahtera didefinisikan persis seperti tertuang dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Bunyinya adalah sebagai berikut. *Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota dan antaranggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.*

Secara lebih rinci yang dimaksud dengan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut (Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1997, hlm.14).

Keluarga prasejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan agama, pangan, sandang, dan kesehatan.

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung dan memperoleh informasi.

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan, namun belum dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap masyarakat.

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tahapan keluarga sejahtera diidentifikasi dengan menggunakan 13 variabel. Variabel tersebut meliputi: agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketigabelas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi 23 item yang terbagi ke dalam empat kelompok. Setiap kelompok mengukur tingkat kesejahteraan keluarga.

Kelompok tersebut juga disusun secara hierarkis mulai dari item-item untuk mengukur keluarga sejahtera tahap I, II, III, dan III+. Bila sebuah keluarga memenuhi semua kriteria seperti tertuang dalam item-item kelompok I, keluarga tersebut telah dianggap masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap I. Bila ada salah satu item yang tidak terpenuhi, keluarga yang bersangkutan masuk dalam tahapan keluarga prasejahtera. Untuk dapat masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap II, sebuah keluarga harus memenuhi semua kriteria atau item-item tahap I dan II.

Bila ada salah satu kriteria tahap II yang tidak terpenuhi, keluarga tersebut hanya terkategori ke dalam tahap I. Untuk dapat masuk kategori III, keluarga tersebut harus memenuhi kriteria tahap I, II, dan III. Demikian juga untuk masuk kategori III+, kategori yang harus dipenuhi adalah kriteria tahap I, II, III, dan III+. Salah satu ciri dari pengukuran keluarga sejahtera dengan model ini adalah ketatnya kriteria yang harus dipenuhi dan disusun secara hierarkis. Jadi, meskipun sebuah keluarga memenuhi kriteria tahap II, III, dan III+, salah satu item dalam tahap I tidak terpenuhi maka keluarga tersebut masuk kategori prasejahtera.

Adapun item-item untuk mengukur keluarga sejahtera yang disusun secara urut adalah sebagai berikut.

Keluarga sejahtera tahap I

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai bukan berupa tanah.
5. Bila anak sakit dan atau PUS ingin ber-KB mereka dibawa ke sarana/petugas kesehatan serta diberi obat/cara KB modern.

Keluarga sejahtera tahap II

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.

7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk-pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian setahun terakhir.
9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga pada tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
11. Paling tidak satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 6-15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih berstatus PUS saat ini memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

Keluarga sejahtera tahap III

15. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama/penyegaran di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.

20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

Keluarga sejahtera tahap III

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu) dan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

Dalam rangka melihat akurasi atau validitas data yang diperoleh, pertama-tama harus dilihat dari alat ukurnya (Carmines & Zeller, 1994). Alat ukur yang tidak memadai tidak akan menghasilkan data yang akurat. Untuk menilai akurasi data, perlu dilakukan uji validitas alat ukur yang bersangkutan. Uji validitas atau validasi yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu menurut jenis validitas yang diinginkan. Ada beberapa jenis validitas yang sudah dikenal dan berikut ini diuraikan secepatnya untuk mengingatkan dan mencocokkannya dengan hal yang dibicarakan di sini.

Pertama adalah validitas logika atau validitas konstruksi. Suatu alat ukur dikatakan valid bila disusun atau mencerminkan logika yang jelas dan mudah diterima. Untuk kepentingan ini, pada umumnya suatu alat ukur disusun berdasarkan pada konstruksi teoretis tentang hal-hal yang akan diukur. Dengan melihat register pendataan keluarga saja, masih sulit

untuk menebak kerangka konseptual yang menjadi dasar penyusunannya. Meskipun demikian, ada kesan yang jelas bahwa pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pragmatisme dibandingkan dengan bangunan teorinya.

Kedua adalah validitas isi. Validitas ini dapat dicapai bila item-item yang ada dalam alat ukur tersebut relevan, penting, dan terfokus pada hal yang hendak diukur. Bila *makan bersama sekali sehari untuk berkomunikasi* sebagai salah satu item menjadi satu kesatuan konsep yang hendak diukur berarti makan bersama saja tanpa berkomunikasi atau berkomunikasi intensif tanpa makan bersama tidak masuk dalam konsep tersebut. Dengan adanya dua konsep yang dipadukan dalam satu item, apakah pendata sadar betul bahwa kedua konsep tersebut sama-sama penting? Kesalahan yang diduga sering terjadi dengan item seperti ini adalah pemahaman pada salah satu konsep saja. Hal ini dapat dilihat dalam petunjuknya. Di sana dijelaskan bahwa tujuan item ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses interaksi di dalam keluarga, tetapi penjelasan rinci dan contoh pertanyaannya hanya menyinggung masalah makan bersama.

Ketiga adalah validitas faktorial. Di sini dipermasalahkan bagaimana kecocokan antara setiap item dengan keseluruhan item. Idealnya, alat ukur tingkat kesejahteraan keluarga mengungkap semua potensi dalam suatu keluarga, baru kemudian hasil total penjumlahan potensi itu dijadikan pertimbangan untuk mengategorisasi keluarga yang diukur. Register pendataan keluarga tidak mengguna-

kan cara demikian. Item disusun berdasarkan urutan yang *hierarkis* sehingga apabila satu keluarga tidak memenuhi item tertentu, keluarga tersebut tidak akan terkategori ke dalam tahap kesejahteraan yang lebih tinggi lagi di atas item tersebut. Dengan demikian, dari segi validitas faktorial, alat ukur ini terasa kurang sensitif.

Terakhir adalah validitas empiris. Validitas ini menuntut adanya kesesuaian antara hasil pengukuran dengan kondisi senyatanya. Hal ini akan lebih terasa bila yang diukur memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Item tentang luas rumah dan frekuensi tindakan tertentu, seperti yang diungkap dalam register pendataan keluarga, menuntut kecermatan yang tinggi sebelum dikategorisasi. Upaya pengukuran ulang yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan, seperti dipaparkan di bawah ini, merupakan salah satu upaya validasi pengukuran keluarga sejahtera yang selama ini dilakukan oleh BKKBN.

Di samping validitas, alat ukur seperti register pendataan keluarga juga dituntut memiliki reliabilitas. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari pengukuran akan menunjukkan konsistensi bila diukur kembali terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama, dan dalam kondisi yang sama (Ancok, 1995). Reliabilitas pengukuran yang telah dilakukan oleh BKKBN akan diuji oleh PPK UGM seperti yang akan ditunjukkan pada bagian selanjutnya. Meskipun demikian, upaya pengukuran ulang ini barangkali tidak banyak menggambarkan uji validitas empiris dan reliabilitas alat ukur, tetapi lebih banyak

menggambarkan variasi hasil pengukuran akibat dari penyelenggaraan pengukuran yang berbeda.

Penyelenggaraan Pendataan

Petunjuk teknis pendataan keluarga sejahtera telah disusun sedemikian rinci sehingga pelaksanaan pendataan mestinya dapat berjalan dengan baik dan standar. Dari petunjuk tersebut terungkap bahwa pendataan seharusnya dilakukan secara langsung kepada keluarga, melalui kepala atau anggotanya. Bahkan, di sana tercantum beberapa contoh cara menanyakan item demi item.

Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendataan keluarga sejahtera tidak standar. Secara umum pendataan ini sangat mengandalkan pada pengamatan si pendata, bukan pada wawancara langsung. Dari sinilah awal ketidakstandaran pendataan tersebut. Observasi adalah metode pengumpulan data yang paling mudah dilaksanakan selama objeknya ada dan pengumpul data memiliki alat atau indera untuk mengamati. Namun bila dicermati, observasi sesungguhnya merupakan metode yang paling sulit diterapkan untuk mendapatkan data yang valid. Pengamatan tidak hanya terbatas kepada kemampuan indera untuk merekam informasi yang ada, tetapi juga sangat tergantung pada persepsi si pengamat. Kata persepsi di sini diberi perhatian khusus untuk mengingatkan bahwa hasil dari persepsi itu sering berbeda dengan kondisi objektifnya.

Pengamatan sebagai cara utama dalam pendataan keluarga sejahtera dapat diandalkan keakuratannya bila dilakukan berulang-ulang. Asumsi inilah yang digunakan oleh BKKBN untuk memanfaatkan *orang setempat* sebagai pendata. Kelompok dasa wisma dan pengurus RT, misalnya, banyak mengetahui keadaan keluarga-keluarga setempat. Asumsi ini tidak berlaku bagi semua kelompok masyarakat. Pada komunitas yang anggota-anggotanya erat berhubungan, seperti di pedesaan, pendataan seperti itu akan lebih mudah dilakukan. Namun, pada masyarakat yang ikatan sosialnya tidak erat, pendataan tersebut akan lebih sulit. Di samping itu, pada semua kelompok masyarakat selalu dijumpai berbagai masalah sosial yang menyebabkan terjadi bias-bias persepsi. Perasaan *ingroup-outgroup* merupakan salah satu masalah yang paling sering muncul. Bila masalah ini muncul dalam pendataan, besar kemungkinan mereka yang mendata akan menempatkan kelompoknya pada kedudukan yang *favourable*, sementara kelompok lain menjadi *less favourable*. Bias-bias pengamatan dan persepsi lain kemungkinan masih banyak lagi terjadi (Brigham, 1991).

Masalah lain yang muncul dalam pendataan berkaitan dengan kemampuan dan kemauan. Sesungguhnya format yang dibuat oleh BKKBN diupayakan sedemikian sederhana. Harapannya, setiap orang dapat melakukan pendataan tersebut. Pada prakteknya, cara yang sederhana itu tidak selalu dapat dilakukan. Ada keengganan pada pihak yang *ditunjuk* untuk melakukannya. Akibatnya, ada tiga pola yang terjadi. Pertama,

pendataan tidak dilakukan sama sekali. Penelitian ini jelas menemukan beberapa wilayah dalam satu desa yang tidak memiliki data keluarga sejahtera sama sekali. Di samping itu, ditemukan juga beberapa lembar data yang tidak terisi dengan baik. Kasus yang cukup banyak dijumpai menunjukkan bahwa item-item untuk menentukan tahapan kesejahteraan keluarga tidak diisi atau hanya sebagian kecil diisi, tetapi hasil penahapannya terisi. Kedua, dilakukan pendataan kilat oleh satu orang. Tidak semua keluarga dikenal baik oleh orang ini, namun penilaian dilakukan dengan perkiraan yang didasarkan pada sedikit data dan banyak dugaan. Ketiga, pendataan diserahkan kepada orang lain yang kurang mengenal wilayah setempat. Salah satu contoh yang ditemui dalam penelitian ini adalah pendataan oleh mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN). Sebagai insan yang cukup terdidik, mereka sebenarnya sangat potensial menjadi pendata. Namun, beberapa item dalam data keluarga sejahtera menggali informasi tentang kebiasaan keluarga berdasar pengamatan. Mahasiswa KKN yang tinggal di wilayah itu dalam tempo yang singkat dapat dipastikan belum banyak mengenal wilayah dan kebiasaan keluarga-keluarga di sana. Ketika mereka harus mengisi formulir data keluarga sejahtera, dapat dipastikan banyak data yang kurang sesuai dengan kondisi senyatanya.

Format, tepatnya bentuk fisik, pendataan keluarga memang tampak sederhana, namun item-itemnya tidak sederhana. Dalam istilah pengukuran memang tidak ada alat ukur yang sederhana karena tujuan utamanya

adalah sofistikasi. Bila pendataan keluarga dicermati, ada kompleksitas yang harus benar-benar diperhatikan, terutama sasaran tiap item. Pendataan keluarga sejahtera membidik keluarga dan anggota-anggotanya. Kata *keluarga* atau *anggota keluarga* bisa diinterpretasi satu, beberapa, atau semua anggota keluarga. Ada tiga item yang menyebut anggota keluarga sebagai sasaran dari item tersebut. Sementara itu, item-item lain menyebut sasaran secara lebih spesifik seperti *seluruh anggota keluarga*, *kepala keluarga*, dan *satu orang anggota keluarga*. Perbedaan beberapa istilah tersebut tentu memiliki maksud-maksud tertentu. Apakah dapat dipastikan bahwa pengambil data tahu persamaan atau perbedaan istilah-istilah tersebut? Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pendata BKKBN kurang memperhatikan masalah detil seperti ini.

Item tentang agama ditanyakan tiga kali. Dua di antaranya sangat mirip. Perbedaannya hanya terletak pada kata *teratur*. Di sini diidentifikasi tentang pelaksanaan ibadah. Sepintas orang akan beranggapan bahwa ibadah yang dimaksud adalah *ibadah pokok* seperti salat dan puasa bagi orang Islam. Apakah benar ini yang dimaksudkan? Bila benar demikian, telah terjadi simplifikasi yang berlebihan dalam mengukur keluarga sejahtera. Bila yang dimaksud ibadah lebih luas daripada itu, masalah yang muncul terletak pada metode pengukuran. Salah satu kaidah pengukuran adalah spesifikasi item. Bila item tentang ibadah dimaksud untuk mengungkap begitu banyak macam dan jenis ibadah, item tersebut tidak memenuhi kaidah. Dengan demikian, *construct validity* alat ukur ini

tidak terpenuhi. Dalam hal ini pendata BKKBN juga tampak tidak peduli. Di samping itu, ada kecurigaan bila mereka sesungguhnya tidak dapat mengamati hal-hal seperti dimaksud dalam item ini.

Hasil Pendataan

Berangkat dari catatan-catatan tersebut, dilakukanlah pendataan keluarga sejahtera di empat desa. Pendataan ini merupakan bagian dari penelitian tentang KB, Keluarga Sejahtera, dan Aktivitas Wanita yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Item-item yang ada dalam formulir pendataan keluarga ditanyakan ulang sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan terdahulu. Ada beberapa item yang diubah formulasinya, namun hakikatnya tetap sama. Misalnya, dalam formulir ada item tentang *luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah* dalam penelitian ini diubah menjadi dua pertanyaan tentang luas lantai rumah dan jumlah penghuni. Untuk mengukur kepadatan rumah digunakan angka rasio antara luas lantai rumah dengan jumlah penghuni. Angka rasio inilah yang digunakan untuk menilai apakah tiap penghuni rumah memiliki ruang gerak sedikitnya 8 meter persegi.

Untuk membandingkan pendataan hasil penelitian dengan pendataan oleh BKKBN, dikumpulkan pula data-data yang sudah terdokumentasi. Selang antara pendataan oleh BKKBN dengan penelitian ini tidak lebih dari enam bulan. Catatan waktu yang berbeda antara keduanya menjadi salah satu hal

yang dipertimbangkan dalam membuat perbandingan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan BKKBN berbeda jauh dengan hasil pendataan PPK UGM (Tabel 1). Hasil pendataan yang dilakukan oleh BKKBN secara umum mengategorisasikan keluarga di empat wilayah *lebih sejahtera* dibandingkan dengan hasil pendataan oleh PPK UGM. Menurut pendataan BKKBN, keluarga-keluarga yang didata masuk kategori sejahtera (KS II, III, dan III+), sementara menurut pendataan PPK UGM sebagian besar keluarga tersebut justru masuk kelompok kurang sejahtera (pra-KS dan KS I). Perbedaan yang mencolok antara kedua hasil pendataan ditemukan pada *setiap wilayah dan setiap tahapan*. Dengan mencermati wilayah dan tahapan seperti terlihat pada Tabel 1, belum bisa ditarik kesimpulan penyebab perbedaannya. Oleh karena itu, barangkali akan lebih jelas bila perbandingan antara dua pendataan itu dilihat secara lebih rinci, yaitu pada tiap item (hasil perhitungan detil lihat Dwiyanto dkk., 1997).

Untuk mempermudah perbandingan hasil pendataan antara keduanya, Tabel 2 hanya memaparkan selisih persentase perbedaan pendataan untuk tiap item. Dari tabel tersebut tampak bahwa ada sembilan item yang menurut kedua pendataan tersebut tidak berbeda mencolok (0-3%), tiga item berbeda antara 3 hingga 10 persen, dan sebelas item memiliki perbedaan di atas sepuluh persen. Di sini tampak bahwa hasil pendataan BKKBN memang cenderung menempatkan keluarga pada posisi yang *lebih sejahtera*

Tabel 1
Perbandingan Data BKKBN dan UGM: Distribusi Tahapan Keluarga Sejahtera**

Tahapan	Wilayah 1 (kota)		Wilayah 2 (desa)		Wilayah 3 (kota)		Wilayah 4 (desa)		Total Sampel	
	BKKBN	UGM	BKKBN	UGM	BKKBN	UGM	BKKBN	UGM	BKKBN	UGM
Prasejahtera	10,2	44,9	26,2	46,4	2,3	32,0	5,8	17,1	10,3	33,5
Sejahtera I	42,8	48,7	10,6	33,5	0,0	54,1	20,9	52,1	17,0	47,5
Sejahtera II	44,3	3,2	19,0	15,6	0,0	9,9	15,2	28,4	18,0	15,6
Sejahtera III	2,7	0,0	35,8	0,0	70,5	0,0	27,3	0,0	37,1	0,0
Sejahtera III+	1,1	3,2	8,4	4,5	27,2	4,0	30,8	2,4	17,6	3,4
Jumlah kasus	187	187	179	179	172	172	257	257	795	795

* Sumber: Register Pendataan Keluarga 1996 dan Dwiyanto dkk. (1997)

** Pengumpulan data BKKBN dilakukan melalui *sensus*, sedangkan Data UGM diperoleh melalui survei. Perbedaan ini tentunya memiliki implikasi terhadap validitas eksternal dari kesimpulan perbandingan ini, misalnya karena *sampling error*. Karena banyak item yang *missing* dalam data registrasi, untuk memudahkan perbandingan, keluarga yang memiliki item yang *missing* dalam registrasi terpaksa dikeluarkan dari sampel. Perbandingan ini tidak dilakukan untuk menggambarkan kondisi data registrasi keluarga sejahtera secara keseluruhan, tetapi hanya untuk menunjukkan perbedaan data keluarga sejahtera BKKBN dan UGM di keempat wilayah sampel.

dibandingkan dengan pendataan PPK UGM.

Ada beberapa hal, sebagian sudah dijelaskan di atas, yang mungkin bisa dijelaskan perbedaan yang mencolok antara dua pendataan itu. Pertama, pendataan yang dilakukan oleh BKKBN tidak langsung menanyakan kepada anggota keluarga yang diukur, tetapi berdasar pada observasi dan penilaian *orang setempat*, sementara PPK UGM mewawancarai langsung salah satu anggota keluarga yang didata. Oleh karena itu, beberapa item yang dalam pendataan membutuhkan observasi langsung sulit dijamin keakuratannya. Ada beberapa item yang sulit dinilai tanpa melihat dan menanyakan secara lebih jeli; di antaranya adalah (a) *anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut*, (b) *seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir*

dalam keadaan sehat, (c) *sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga*, (d) *keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antaranggota keluarga*, dan (e) *keluarga mengadakan rekreasi bersama/penyegaran di luar rumah paling kurang dalam enam bulan*.

Kedua, pendataan yang dilakukan oleh PPK UGM berlangsung antara satu hingga enam bulan sesudah pendataan dilakukan oleh BKKBN. Selama waktu tersebut kemungkinan terjadi perubahan. Contoh yang jelas adalah pada item *bagian yang terluas dari lantai bukan dari semen*. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu fungsi pendataan KS adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sehingga dapat dikenai program tertentu. Setelah rumah-rumah diketahui ada

Tabel 2.
Perbedaan Indikator Keluarga Sejahtera Hasil Pendataan BKKBN dan PPK UGM

Indikator Keluarga Sejahtera	Wilayah 1 (kota)	Wilayah 2 (desa)	Wilayah 3 (kota)	Wilayah 4 (desa)	Total sampel
Tahap I					
Anggota keluarga melaksanakan ibadah	+	=	=	=	=
Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari	=	=	=	=	=
Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian	=	=	=	=	=
Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah	-	-	=	=	=
Pemanfaatan fasilitas kesehatan dan KB modern	*	+	=	*	+
Tahap II					
Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur	*	*	*	*	*
Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/telur/ikan sebagai lauk	=	=	=	=	=
Seluruh anggota keluarga memperoleh satu stel pakaian baru setahun terakhir	=	=	=	=	=
Luas lantai tanah minimal 8 m ² per penghuni	*	+	+	+	*
Seluruh anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir	*	*	*	*	*
Setidaknya ada satu anggota keluarga berusia di atas 15 tahun berpenghasilan tetap	=	=	=	=	=
Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin	*	*	+	+	*
Seluruh anak berusia 6-15 tahun bersekolah	=	+	+	=	=
Bila anak hidup 2/lebih PUS memakai kontrasepsi (kecuali hamil)	*	=	*	*	*
Tahap III					
Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama	-	=	=	=	-
Sebagian penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga	--	*	*	*	*
Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu digunakan untuk berkomunikasi	--	*	*	*	*
Keluarga biasanya ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal	=	=	-	=	=
Keluarga mengadakan rekreasi bersama paling kurang sekali dalam 6 bulan	--	*	--	*	*
Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah	=	+	=	+	+
Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi	*	+	+	*	*
Tahap III+					
Keluarga atau anggota secara teratur dan sukarela memberikan sumbangan dalam bentuk materi	--	--	=	=	--
Kepala atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan	--	--	--	--	--

Catt.: (=) indikasi perbedaan 0-3% antara data UGM dan data BKKBN.
 (+) indikasi data BKKBN 3-10% lebih tinggi daripada hasil survei UGM
 (*) indikasi data BKKBN >10% daripada data UGM
 (-) indikasi data BKKBN 3-10% lebih rendah daripada data UGM
 (--) indikasi data BKKBN >10% lebih rendah daripada data UGM

yang belum disemen, BKKBN memberikan bantuan untuk penyemenan. Dengan demikian, saat dilakukan pendataan oleh PPK UGM, kondisinya lebih baik seperti ditemukan di dua daerah penelitian.

Perlu diketahui bahwa survei ini dilakukan pada Desember 1996 -- Maret 1997, jauh sebelum krisis ekonomi terjadi. Interpretasi bahwa perbedaan dari kedua data itu menunjukkan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tidak cukup beralasan. Dengan demikian, perbedaan antara data registrasi dengan data survei bukan disebabkan oleh memburuknya situasi ekonomi yang mungkin berakibat terhadap semakin rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi responden.

Ketiga, tidak tertutup kemungkinan adanya *self fulfilling prophecy* yang dilakukan oleh BKKBN ketika melakukan pendataan. BKKBN menilai lebih tinggi dibandingkan dengan PPK UGM pada dua item yang berkaitan dengan keluarga berencana. Dua item tersebut adalah *bila anak sakit dan atau PUS ingin ber-KB mereka dibawa ke sarana/petugas kesehatan serta diberi obat/cara KB modern dan bila anak hidup 2 atau lebih keluarga yang masih berstatus PUS saat ini memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil)*. Pada kenyataannya (lihat Dwiyanto dkk., 1997), banyak keluarga sehat dan membatasi jumlah anak tanpa menggunakan metode kesehatan dan kontrasepsi modern. Hasil penelitian Dwiyanto dkk. menunjukkan bahwa penggunaan alat dan metode kontrasepsi tradisional sekitar delapan persen pada tiga dari empat wilayah penelitian. Pengguna cara-cara tradisional dalam

memelihara kesehatan juga sangat banyak. Mereka ini diklaim dalam pendataan BKKBN sebagai pemakai metode kesehatan dan kontrasepsi modern. Kecenderungan BKKBN memperoleh hasil pendataan yang lebih tinggi untuk jumlah peserta KB bukan hal yang baru. Penelitian Tukiran dkk. (1987), misalnya, menunjukkan bahwa peserta KB aktif yang dilaporkan BKKBN ternyata 23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian.

Keempat, ada item yang sulit diinterpretasi. Penggunaan kata **keluarga, anggota keluarga, dan seluruh anggota keluarga** sering diabaikan perbedaannya. Pada pendataan PPK UGM ketiganya diperhatikan dan dioperasionalisasi secara berbeda. Misalnya untuk menanyakan **seluruh anggota keluarga**, tiap-tiap anggota keluarga diidentifikasi. Bila ada salah satu anggota yang tidak memenuhi kategori yang dimaksudkan, item tentang **seluruh anggota keluarga** dianggap tidak terpenuhi. Penggunaan kata **dan atau** sekaligus juga menyulitkan untuk membuat kategorisasi. Secara logika **dan** digunakan untuk menggabungkan dua hal atau lebih menjadi satu. Bila salah satu tidak dapat masuk kategori, dua hal atau lebih yang digabungkan itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk kategori. Ini berbeda dengan kata **atau** yang bermakna substitusi. Di sini tidak dibutuhkan adanya pemenuhan syarat untuk semua yang akan masuk kategori, tetapi cukup salah satu. Dengan demikian, ada kerancuan pada item *bila anak sakit dan atau PUS ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan serta*

diberi obat/cara KB modern, dari struktur kalimatnya saja sudah sulit diinterpretasi. Oleh karena itu, bila berpatokan dengan kata **dan**, hasilnya akan lebih kecil dibandingkan dengan bila menggunakan kata **atau**.

Penutup

Bila register pendataan keluarga dianggap sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesejahteraan keluarga, dari uraian dan data yang ditunjukkan di atas dapat disimpulkan bahwa alat tersebut tidak cukup valid dan reliabel. Beberapa item dalam registrasi itu juga perlu didefinisikan secara lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Di samping itu, pelaksanaan pendataan juga ikut memperburuk kualitas data yang dikumpulkan. Apabila sampai saat ini data hasil registrasi tersebut telah dan terus digunakan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dan menentukan program-program aksi, BKKBN sesungguhnya telah bertindak dengan menggunakan dasar yang keliru.

Mengingat pentingnya kualitas data dalam perencanaan dan pengembangan program keluarga sejahtera maka BKKBN perlu mengembangkan sistem pendataan yang lebih baik. Kualitas

data harus menjadi prioritas yang penting bagi pengembangan sistem informasi penduduk dan keluarga (siduga). Penggunaan tenaga volunteer yang sembarangan dalam pendataan keluarga sejahtera mestinya harus dihindari. Mekanisme cek ulang dan koreksi perlu dikembangkan sehingga data registrasi keluarga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan politik.

Kegagalan untuk memperbaiki sistem registrasi keluarga sejahtera bukan hanya akan menghasilkan distorsi dalam mengidentifikasi kelompok sasaran prokesra, tetapi juga membuat data itu sendiri menjadi tidak relevan; apalagi dengan makin memburuknya perekonomian Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, berarti pula makin banyak penduduk dan keluarga Indonesia yang miskin atau tidak sejahtera. Bahkan, sekarang makin mudah mengidentifikasi orang dan keluarga miskin, meskipun tanpa menggunakan instrumen seperti register pendataan keluarga. Artinya, relevansi pendataan itu sendiri sesungguhnya menjadi sangat berkurang. Bila demikian, masiakah BKKBN akan melakukan pendataan seperti yang selama ini dilakukan?

Referensi

- Ancok, Djamaluddin. 1995. *Teknik penyusunan skala pengukur*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Brigham, J.C. 1991. *Social psychology*. New York: Harper Collins.
- Carmines, E.G. dan Zeller, R.A. 1994. "Reliability and validity assesment", dalam M.S. Lewis-Beck, ed. *Basic measurement*. London: Sage Publications.
- Dwiyanto, Agus, et al. 1997. *Family planning, family welfare, and women's activities in Indonesia*. New York?: Family Health International, Research USA and Population Studies Center, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hadi, S. 1984. *Metodologi research*. Jilid 2. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- Indonesia. Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Biro Pelaporan dan Statistik. 1997. *Petunjuk teknis pendataan keluarga sejahtera*. Jakarta.
- Tukiran, Sukamdi dan Sujali. 1987. Laporan penelitian peserta keluarga berencana aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kerjasama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.